

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit ✓	Halaman :	06
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	Tabengan		

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pertahankan Opini WTP dari BPK

KASONGAN - Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto berharap di tahun berikutnya pemerintah daerah bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kata Marwan, setidaknya jangan sampai ada catatan, harus bersih dari penilaian BPK RI.

"Sebab, penilaian itu hasilnya menjadi semangat kerja yang dibuktikan dari pemerintah setempat," ucapnya, Kamis (1/12).

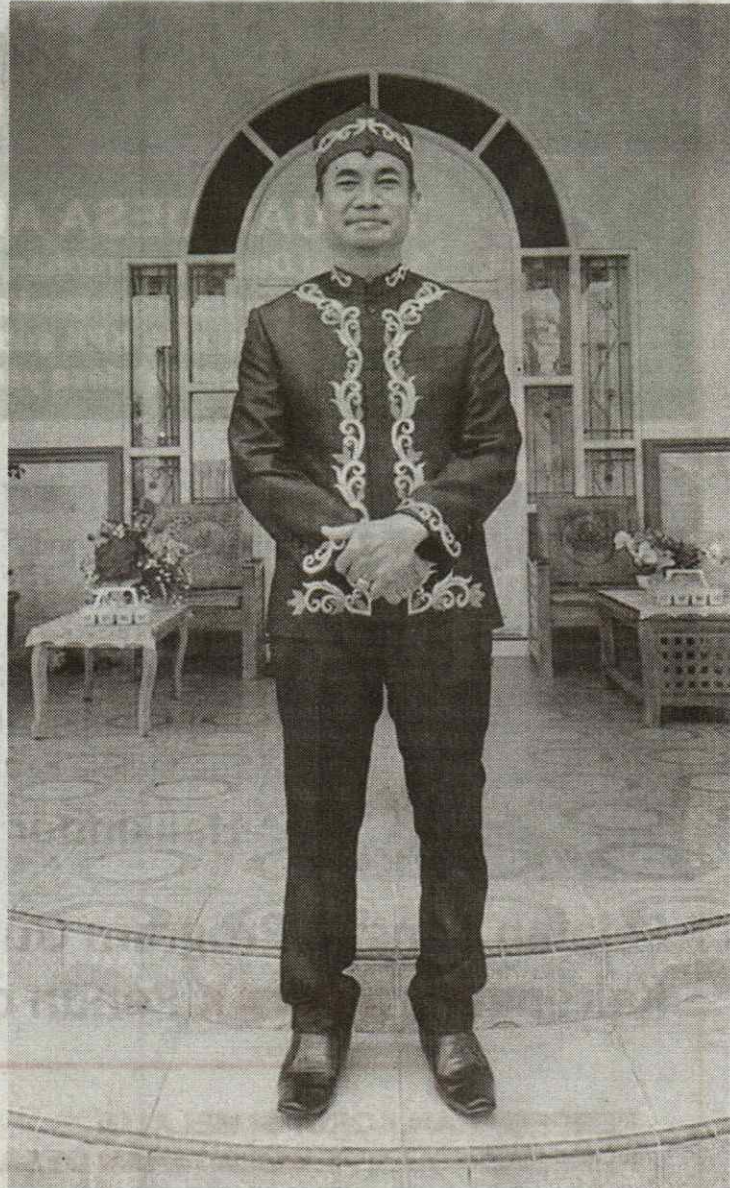
Ia mengatakan, laporan penggunaan anggaran dan keuangan pemerintah Katingan Tahun 2022 sudah berjalan secara akuntabilitas. Keuangan sudah disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif ketika penetapan pagu anggaran dan melalui pembahasan.

"Kami memperingatkan pemerintah daerah untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini jangan ada catatan dari BPK Perwakilan Kalimantan Tengah," katanya.

Menurutnya, dalam mempertahankan nilai baik itu, dirinya juga mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi kerja dengan mematuhi aturan yang berlaku. Mari berprestasi dan berkinerja yang baik dengan menjalankan program kerja yang sudah dirancang dari dalam mencapai hasil yang maksimal.

"Prestasi pemerintah dibuktikan dari keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP. Alasannya, penggunaan anggaran dan pencapaiannya kinerja bisa berjalan maksimal jika dilakukan secara keterbukaan publik dan terencana," imbuhnya.

Dari penilaian BPK itu, laporan penggunaan keuangan masih diberikan catatan dan koreksi terhadap pengelolaannya. Sehingga, Opini WTP harus diterapkan secara



WAWANCARA : Ketua DPRD Katingan Marwan Susanto ketika ditemui Radar Sampit, belum lama tadi.

optimal dalam APBD.

"Pengelolaan keuangan mengalami kemajuan. Salah satunya dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan prosedur hukum atau

Undang-Undang. Sisi kemajuan itu dibuktikan melalui perolehan laporan keuangan dengan opini WTP pada tahun anggaran sebelumnya," pungkasnya. (sos/fm)

ISTIMEWA/RADAR SAMPIT